

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Malaysia adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Malaysia mencapai kemerdekaan sebagai Federasi Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua yaitu Malaysia sebelah barat yang terletak di semenanjung Malaysia, terdiri dari negara Perlis, Kedah, Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor, ditambah dengan wilayah bekas Federasi Malaya dan satu wilayah federal serta Wilayah Persekutuan. Kemudian Malaysia timur yang terletak di pulau Borneo terdiri dari negara Sarawak dan Sabah<sup>1</sup>. Masyarakat Malaysia terdiri dari banyak etnis. Etnis Melayu adalah etnis mayoritas, kemudian terdapat juga etnis China, etnis bumiputera, etnis india dan etnis lainnya yang minoritas. Etnis-etnis ini bercampur dalam berbagai ruang lingkup politik, tempat tinggal, posisi sosial-ekonomi, dan berbagai macam kebiasaan. Islam adalah agama resmi dan juga merupakan agama mayoritas di Malaysia, tetapi kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi Malaysia. Agama lain yang juga terdapat di Malaysia yaitu agama Budha, Confusianisme atau Tao, Hindu, Nasrani, dan kepercayaan nenek moyang yang dianut oleh orang-orang tradisional bumiputera<sup>2</sup>. Dalam hal pemerintahannya, negara ini adalah negara monarki konstitusional berbentuk federal dengan sistem demokrasi parlementer. Kepala negara adalah

---

<sup>1</sup> Karen Christensen dan David Levinson, ed., *Encyclopedia of Modern Asia Vol.4*, Charles Scribner's Sons, New York, 2002, h. 1-4.

<sup>2</sup> Federal Research Division, *Country Profile: Malaysia*, Library of Congress, Washington D. C, 2006, h. 10.

raja Yang Dipertuan Agong. Sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang berasal dari kabinet bentukan raja.

Sebagai negara merdeka, Malaysia turut serta melakukan politik luar negeri. Politik luar negeri Malaysia didasarkan pada membangun hubungan kedekatan dan persahabatan dengan negara-negara di dalam suatu komunitas bangsa-bangsa. Politik luar negeri Malaysia ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional Malaysia, dan juga berkontribusi kepada komunitas bangsa-bangsa yang adil dan setara dalam level internasional<sup>3</sup>. Politik luar negeri Malaysia berfokus pada bagaimana pencapaiannya pada stabilitas politik dalam keamanan domestik dan mengendalikan ancaman regional maupun global. Salah satu cara Malaysia melaksanakan politik luar negerinya yaitu dengan menjadi bagian dalam memprakarsai dan ikut aktif didalam organisasi ASEAN bersama dengan 4 negara lain yang turut serta sebagai pendiri ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Malaysia tentu juga menjadi anggota ASEAN dan turut serta aktif didalamnya.

ASEAN adalah asosiasi yang terdiri dari negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan dokumen

---

<sup>3</sup> Ministry of Foreign Affairs Malaysia, "Foreign Policy Overview",

[http://www.kln.gov.my/web/guest/foreign\\_policy?p\\_p\\_id=56\\_INSTANCE\\_p5AN&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=exclusive&p\\_p\\_mode=view&\\_56\\_INSTANCE\\_p5AN\\_struts\\_action=%2Fjournal\\_content%2Fview&\\_56\\_INSTANCE\\_p5AN\\_groupId=11038&\\_56\\_INSTANCE\\_p5AN\\_articleId=571067&\\_56\\_INSTANCE\\_p5AN\\_viewMode=print](http://www.kln.gov.my/web/guest/foreign_policy?p_p_id=56_INSTANCE_p5AN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_p5AN_struts_action=%2Fjournal_content%2Fview&_56_INSTANCE_p5AN_groupId=11038&_56_INSTANCE_p5AN_articleId=571067&_56_INSTANCE_p5AN_viewMode=print), h. 1, dikunjungi pada tanggal 9 September 2018.

pembentukannya dinamakan Deklarasi Bangkok. Terdapat lima negara pendiri ASEAN yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Kemudian, dalam perjalanan ASEAN, negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara bergabung kedalam ASEAN dan hingga saat ini total 11 negara yang sudah tergabung dalam ASEAN. Tujuan dari ASEAN yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya dan kemajuan sosial di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kerjasama dalam rangka menguatkan dasar untuk kemakmuran dan perdamaian komunitas bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Kemudian bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan abadi untuk keadilan dan peraturan hukum dalam hubungan antar negara-negara di kawasan dan ketaatan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-prinsip dasar bagi hubungan antar negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu; saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional semua bangsa; hak dari setiap negara untuk memimpin negaranya bebas dari intervensi yang berasal dari luar negaranya, baik berbentuk subversif maupun koersif; non intervensi terhadap urusan didalam negeri dari masing-masing negara;

penyelesaian perbedaan atau perselisihan dilakukan dengan cara perdamaian; penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan secara paksa; dan kerjasama efektif antar negara anggota<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> James Martin Center for Nonproliferation Studies, "Association of South East Asian Nations (ASEAN)", <https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/association-southeast-asian-nations-asean/>, 20 November 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 9 September 2018.

Dalam perjalanannya, ASEAN telah mengalami berbagai macam hal, seperti kesepakatan kerjasama antar negara-negara anggota, kesepakatan kerjasama antara ASEAN dan negara lain diluar kawasan, ancaman yang dihadapi, juga krisis dan konflik yang terjadi didalam ASEAN. Salah satu konflik yang terjadi di ASEAN adalah konflik yang dialami oleh etnis Rohingya. Konflik ini terjadi antara Pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya yang telah tinggal cukup lama di wilayah Myanmar sebelum Negara Myanmar terbentuk. Konflik ini memberikan dampak negatif terhadap negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

Malaysia melakukan beberapa tindakan untuk menghentikan konflik etnis Rohingya ini. Namun, apa yang Malaysia lakukan bertentangan dengan prinsip ASEAN, yaitu prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota, mengingat bahwa konflik ini merupakan konflik yang terjadi di dalam negeri Myanmar. Oleh karena itu negara-negara anggota ASEAN seharusnya tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, namun Malaysia tetap mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik dengan etnis Rohingya. Desakan yang dilakukan oleh Malaysia disampaikan didalam banyak kesempatan termasuk didalam forum internasional seperti ASEAN dan OKI. Dalam forum pertemuan para menteri luar negeri se-ASEAN pada 19 Desember 2016, Malaysia menyampaikan bahwa konflik kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya harus diselesaikan bersama oleh seluruh anggota ASEAN. Malaysia memberikan beberapa rekomendasi terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan ASEAN. Kemudian, didalam forum Organisasi Kerjasama Islam, Malaysia memberitahukan tentang kondisi terakhir etnis Rohingya pada saat itu dan juga menyampaikan desakan kepada pemerintah Myanmar didepan negara-negara anggota OKI.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengapa Malaysia melakukan desakan terhadap Pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik Rohingya?

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

Teori adalah bentuk paling umum untuk memberitahu kita mengapa suatu hal bisa terjadi dan kapan sesuatu hal bisa diduga akan terjadi. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan. Konsep-konsep itu dihubungkan menurut urutan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah, dan pernyataan itulah yang disebut dengan teori. Teori mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga memprediksi kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan<sup>5</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri yang berasal dari Teori Peran untuk menganalisis perilaku manusia dan kemudian Teori Peran tersebut diubah ke konteks internasional, dipaparkan oleh K. J. Holsti . Ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami Teori Politik Luar Negeri yang diutarakan oleh K. J. Holsti, Seperti:

### *1. Foreign Policy Role Performance*

*Foreign Policy Role Performance* adalah hal-hal yang berupa bentuk tindakan seperti sikap, keputusan, dan aksi yang diambil oleh suatu pemerintah untuk dilakukan.

---

<sup>5</sup> Mohtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Cetakan kedua, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, h. 185.

2. *Policy Maker's National Role Conceptions*

*National Role Conception* adalah gambaran yang diutarakan oleh Pembuat Kebijakan tentang tujuan atau fungsi yang cocok untuk negara mereka sendiri yang ditujukan kepada lingkungan diluar negaranya. *National Role Conception* adalah aspek pemikiran yang penting dalam pengambilan keputusan luar negeri dalam keseharian suatu negara. *National Role Conception* meliputi definisi Pembuat Kebijakan terhadap segala hal seperti keputusan-keputusan, komitmen-komitmen, peraturan-peraturan, dan tindakan-tindakan yang cocok bagi negaranya, atau fungsi, yang mana merupakan hal yang harus dilakukan untuk keberlanjutan didalam sistem internasional atau didalam sistem regional.

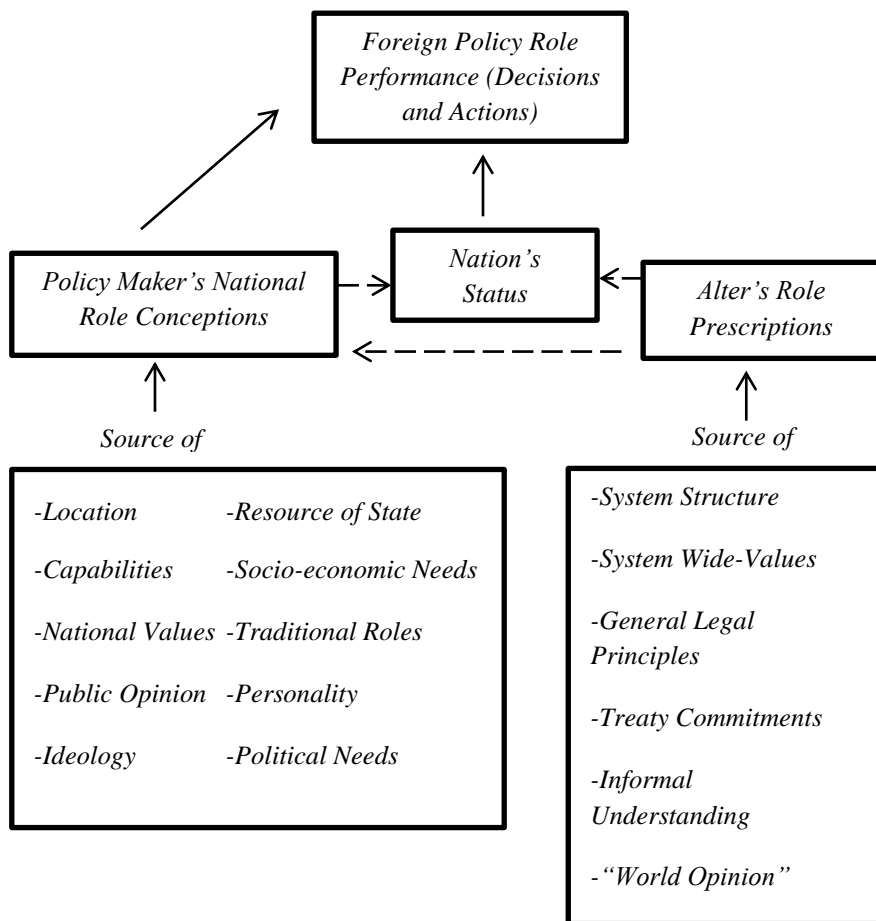
3. *Nation's Status*

*Nation's Status* mengandung arti hanya berupa perkiraan kasar terkait peringkat negara didalam sistem internasional.

4. *Alter's Role Prescription*

*Alter's Role Prescription* adalah faktor-faktor lingkungan eksternal dari suatu negara yang berpotensi dalam penentuan *Role Conception* oleh para Pembuat Kebijakan luar negeri negara tersebut. Disamping itu kita harus mengakui bahwa *Alter's Role Prescription* atau lingkungan eksternal memiliki hubungan dengan analisis kebijakan luar negeri, tapi dalam studi Holsti akan selalu dipertimbangkan. Penekanan akan berada pada *national role conceptions* dan sumber domestik dari konsepsi tersebut.

Gambar 1.1 Modifikasi Teori Peran Untuk Menganalisis Politik Luar Negeri oleh K. J. Holsti<sup>6</sup>



<sup>6</sup>K. J. Holsti, 'National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy', *International Studies Quarterly*, Vol. 14, No. 3, 1970, h. 245.

Dalam gambar diatas, K. J. Holsti menyampaikan asumsi bahwa *Foreign Policy Role Performance (Decisions and Actions)* atau kebijakan luar negeri suatu pemerintahan adalah hasil atau sesuai dengan konsepsi-konsepsi para pembuat kebijakan (*Policy Make'rs National Role Conceptions*) terhadap tujuan dan tugas negara mereka sendiri di dalam sistem internasional atau dalam sistem regional. *Foreign Policy Role Performance* juga mungkin dapat dijelaskan, utamanya dengan mengacu pada konsepsi-konsepsi peran bagi suatu negara yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan untuk menghadapi negara-negara dalam cakupan regional atau dalam sistem internasional. Terdapat sumber-sumber dalam suatu negara yang menentukan pengambilan peran oleh para pembuat kebijakan luar negeri yaitu: lokasi dan kenampakan alam dari suatu negara; sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya teknik; kemampuan yang dimiliki; kebijakan yang bersifat tradisi dari suatu negara; permintaan dan kebutuhan sosial-ekonomi yang diekspresikan melalui partai politik; pergerakan massa, atau kelompok kepentingan; nilai-nilai nasional, doktrin, atau ideologi; tensi opini publik; dan karakteristik atau kebutuhan politik dari para pembuat kebijakan yang utama. *Policy Maker's National Role Conceptions* juga berpotensi dipengaruhi oleh *Alter's Role Prescription* yang berasal dari sumber-sumber dari luar negara tentu termasuk juga struktur dari sistem internasional; bermacam-macam sistem nilai; prinsip legal yang umum; dan peraturan-peraturan, tradisi, dan ekspektasi negara-negara lain yang tertuang dalam piagam organisasi internasional atau regional, "opini dunia", perjanjian multilateral maupun bilateral; komitmen tersembunyi dan "pemahaman". *Nation's Status* dalam model tersebut dapat memungkinkan ataupun tidak untuk memiliki konsekuensi cukup besar terhadap cara Pembuat Kebijakan mendefinisikan orientasi-orientasi atau tugas yang cocok bagi negaranya yang ditujukan ke dunia internasional, sehingga dapat juga memungkinkan untuk mempengaruhi *Foreign Policy Role Performance*. *Nation's Status* dan sumber-sumber



peran dari luar negara memiliki sangkut paut dengan *Foreign Policy Role Performance* namun tidak akan dibahas lebih jauh. Dalam studi K. J. Holsti ini akan dilakukan penekanan pada definisi dari konsepsi-konsepsi peran nasional dan sumber-sumber domestik dari konsepsi-konsepsi itu. Teori Peran yang diubah ke konteks internasional menawarkan kerangka untuk mendeskripsikan *Foreign Policy Role Performance* dan *Policy Maker's National Role Conceptions* serta untuk menyelidiki sumber-sumber dari konsepsi peran yang diambil oleh suatu negara<sup>7</sup>.

Hoslti menyampaikan juga tentang berbagai jenis *National Role Conceptions* yang ia dapatkan berdasarkan analisis dari 972 sumber penelitiannya. *National Role Conceptions* tersebut dibawah ini diurutkan berdasarkan tingkat keaktifan gerakan dari *National Role Conceptions* yang digunakan dalam politik luar negeri, dari *National Role Conceptions* yang tingkat keaktifan tertinggi hingga *National Role Conceptions* yang tingkat keaktifan terendah. Ada 17 jenis *National Role Conceptions* yang beliau sampaikan, antara lain:

1. *Bastion of Revolution-Liberator*

Beberapa pemerintahan meyakini bahwa mereka memiliki tugas untuk mengorganisir atau memimpin beberapa macam tindakan revolusi diluar negeri. Satu tugas negara mereka yaitu untuk membebaskan aktor lain atau untuk bertindak sebagai “benteng pertahanan” atau pergerakan revolusi, yang mana menyediakan anggapan sebagai sumber bantuan fisik dan moral serta inspirator ideologi bagi pemimpin revolusi diluar negara mereka.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 244-247.

2. *Regional Leader*

Jenis *national role conception* ini lebih mengacu kepada tugas atau tanggung jawab khusus yang dipersepsikan oleh suatu pemerintahan di dalam hubungannya dengan negara-negara di regional atau kawasan tertentu, atau subsistem lintas sektoral contohnya seperti pergerakan komunis internasional.

3. *Regional Protector*

*National role conception* jenis ini, meskipun hanya secara tersirat, bahwa suatu pemerintahan mengambil tanggung jawab kepemimpinan khusus dalam suatu regional atau suatu isu dalam area tertentu, namun *national role conception* jenis ini menempatkan penekanan pada fungsi untuk menyediakan perlindungan yang diperuntukkan bagi regional yang berdekatan.

4. *Active Independent*

Peran ini menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara hanya akan dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya sendiri dan bukan untuk melayani kepentingan nasional negara lain, bebas untuk aktif mengelola hubungannya dengan sebanyak mungkin negara. Peran ini juga menekankan bahwa politik luar negerinya menjunjung nilai kemerdekaan, kebebasan menentukan kebijakan sendiri, memungkinkan adanya fungsi mediasi, dan aktif untuk memperluas hubungan diplomatik dan hubungan ekonomi ke berbagai area yang berbeda diseluruh dunia.

5. *Liberation Supporter*

Tidak seperti *national role conception* jenis *bastion of the revolution-liberator* diatas. *b* ini tidak mengindikasikan adanya tanggung jawab formal untuk mengorganisir, memimpin, atau mendukung pergerakan pembebasan diluar

negeri secara fisik. Kebanyakan pernyataan dari national role conception ini mendukung gerakan-gerakan pembebasan yang pernyataan-pernyataan tersebut muncul secara rutin dan formal; mereka menyarankan dengan gelagat yang tidak terstruktur dan tidak jelas terkait tindakan-tindakan apa saja yang akan diambil untuk menerapkan national role conception ini.

6. *Anti-Imperialist Agent*

Ketika imperialisme dirasakan sebagai ancaman serius, banyak pemerintahan melihat diri mereka sendiri sebagai agen pejuang melawan imperialisme. Namun banyak pemerintahan yang dimaksud tadi tidak terbatas pada negara yang terdapat partai komunis.

7. *Defender of The Faith*

Beberapa pemerintahan menganggap tujuan dan komitmen dari politik luar negeri mereka dalam hal melindungi nilai dalam sistem ( daripada isu teritorial tertentu ) dari serangan. Mereka yang mendukung dan mengambil *national role conception* jenis *defender of the faith* melakukan tanggung jawab khusus untuk menjamin kemurnian ideologi dalam suatu grup negara atau organisasi antar negara.

8. *Mediator-Integrator*

Dalam penelitian Holsti yang berisi sampel berjumlah 71 negara, sejumlah besar pemerintahan merasakan diri mereka sendiri mampu, atau bertanggung jawab untuk memenuhi atau melakukan tugas khusus untuk mendamaikan konflik antar negara atau kelompok negara ( pernyataan yang menyatakan peran mediator hanya dalam satu krisis tertentu tidak dihitung). *National role conception* ini mengindikasikan persepsi untuk melanjutkan

tugas membantu mendamaikan perbedaan dari pihak yang bertikai.

9. *Regional-Subsystem Collaborator*

Peran yang mengindikasikan komitmen kerjasama dengan negara lain untuk bisa membangun komunitas yang lebih luas atau untuk subsistem lintas batas seperti Gerakan Komunis.

10. *Developer*

Mengindikasikan tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negara-negara tertinggal. Penunjukan terhadap kemampuan atau keuntungan mengusahakan keberlanjutan dari tugas peran ini selalu sering muncul.

11. *Bridge*

*National role conception* ini selalu muncul dalam bentuk yang tidak jelas atau samar-samar, dan kebijakan yang berasal darinya tidak jelas kelihatan sedangkan bentuk dari peran mediator-integrator diatas tadi menyiratkan beberapa bentuk penempatan sasaran diplomatik kedalam area atau isu konflik. Peran bridge biasanya menyiratkan fungsi komunikasi yang bertindak sebagai “penterjemah” atau pembawa pesan dan informasi antara orang-orang dari berbagai macam budaya

12. *Faithful Ally*

Suatu pemerintahan membuat komitmen spesifik dan jelas untuk mendukung kebijakan dari pemerintahan lainnya.

13. *Independent*

Peran ini berisikan kebijakan yang bersifat non-blok, mengindikasikan bahwa suatu pemerintahan akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri daripada mendukung tujuan dari negara lain. Peran ini menekankan suatu pemerintahan yang

bebas untuk menentukan sendiri kebijakannya, sebaliknya mereka tidak menyiratkan suatu tugas yang berkelanjutan atau fungsi tertentu dalam sistem.

14. *Example*

Peran ini menekankan pada pentingnya menaikkan wibawa dan mendapatkan pengaruh didalam sistem internasional dengan membuat kebijakan-kebijakan domestik tertentu. Peran ini tidak membutuhkan program diplomatik resmi atau tugas khusus diluar batas-batas wilayah negara.

15. *Internal Development*

Konsep peran ini memiliki sedikit pernyataan yang merujuk mengenai suatu fungsi atau tugas dari suatu pemerintahan didalam sistem internasional. Semua usaha suatu pemerintahan harus diarahkan langsung untuk menghadapi masalah perkembangan internal negaranya. Dalam peran ini menyarankan untuk tidak ikut terlibat didalam politik internasional, tapi tidak menutup kemungkinan diadakannya beberapa bentuk kerjasama internasional, seperti dalam hal ekonomi atau masalah teknis.

16. *Isolate*

Peran ini meminimalkan kontak dengan dunia luar suatu negara dalam bentuk apapun. Pernyataan dari peran ini mengungkapkan ketakutan untuk melibatkan diri didunia luar dalam bentuk apapun dan menekankan untuk bergantung pada diri sendiri saja.

17. *Protectee*

Beberapa pemerintahan menyinggung tanggung jawab negara lain untuk melindungi mereka, sebaliknya tidak mengindikasikan adanya tujuan, tugas atau fungsi tertentu kepada lingkungan luar. Pernyataan menyinggug tersebut lebih

ditujukan langsung kepada suatu negara dan bukan perannya<sup>8</sup>.

Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Malaysia terkait dengan konflik yang dialami oleh Rohingya adalah antara lain dengan terus mendesak agar Pemerintah Myanmar menghentikan konflik etnis Rohingya. Malaysia juga memanggil Duta Besar Myanmar dinegaranya dan menyampaikan protes terkait kekerasan yang dilakukan Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Malaysia juga telah mempersiapkan diri untuk melakukan pertemuan kepada Penasihat Negara Myanmar dan kepada Aung San Suu Kyi untuk berdiskusi bagaimana negara mayoritas Muslim dapat membantu Myanmar dalam penghentian konflik yang dialami etnis Rohingya. Kemudian, Malaysia menyinggung tentang konflik Rohingya di dalam pertemuan *ASEAN Foreign Ministers Retreat* di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. Dalam forum itu, Malaysia menyampaikan bahwa krisis humanitarian yang dialami oleh etnis Rohingya ini adalah krisis yang bisa mengancam keamanan dan stabilitas regional ASEAN. Pernyataan itu dibuktikan Malaysia dengan menyampaikan fakta bahwa akibat krisis ini, banyak etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara disekitarnya seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia sendiri. Perpindahan penduduk yang tidak wajar ini akan mengancam keamanan sosial, ekonomi dan keamanan negara tujuan pelarian etnis Rohingya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 260-271.

Ancaman juga datang dari adanya laporan pemerintah Myanmar bahwa krisis ini memiliki dugaan terhubung dengan kaum teroris ISIS, yang mana hal ini juga bisa mengancam keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> YB Dato' Sri Anifah Aman, "INTERVENTION BY YB MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AT THE ASEAN FOREIGN MINISTERS' RETREAT YANGON, MYANMAR, 19 DECEMBER 2016", <http://myasean.kln.gov.my/myaseanv2/index.php/speechesstate/ents-mainmenu-66/114-intervention-by-yb-minister-of-foreign-affairs-at-the-asean-foreign-ministers-retreat-yangon-myanmar-19-december-2016>, 19 Desember 2016, h. 1, dikunjungi pada tanggal 14 Agustus 2018.

Krisis yang dialami Rohingya ini digaungkan juga oleh Malaysia kepada negara-negara Islam melalui forum *Organization of Islamic Cooperation Contact Group* di New York pada tahun 2017. Pernyataan yang dilontarkan adalah bahwa krisis humanitarian yang dialami oleh Rohingya dapat menyebabkan Malaysia dan negara-negara tetangganya mengalami instabilitas di regional ASEAN<sup>10</sup>.

Berdasarkan hal-hal diatas yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia dalam pernyataan tertulis, menunjukkan bahwa *Policy Maker's National Role Conceptions* yang diambil oleh Malaysia adalah *Defender of The Faith*. *Defender of The Faith* memiliki maksud yaitu beberapa pemerintahan yang melaksanakan kebijakan luar negeri negaranya untuk melindungi nilai-nilai (daripada teritori spesifik) bersama yang menurut mereka mulai

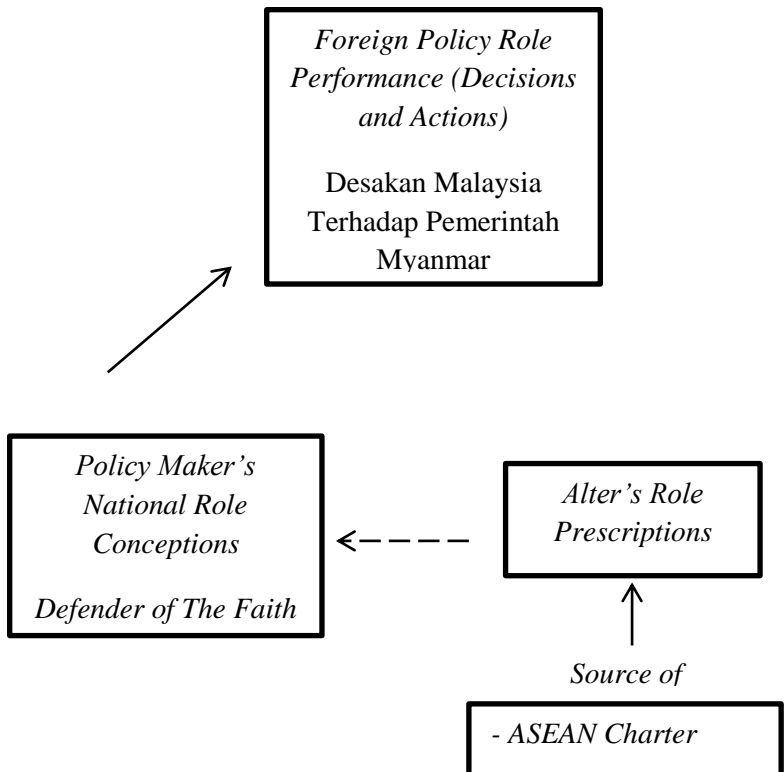
---

<sup>10</sup> YB Dato' Sri Anifah Aman, "STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AT THE OIC CONTACT GROUP ON THE ROHINGYA MUSLIM MINORITY IN MYANMAR NEW YORK, 19 SEPTEMBER 2017", [http://www.kln.gov.my/web/nam\\_windhoek/s2017/-/asset\\_publisher/ME2g/blog/statement-by-the-minister-of-foreign-affairs-at-the-oic-contact-group-on-the-rohingya-muslim-minority-in-myanmar-new-york-19-september-2017?redirect=%2Fweb%2Fnam\\_windhoek%2Fs2017%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_ME2g%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3D118\\_INSTANCE\\_2hlE\\_column-1%26p\\_p\\_col\\_pos%3D1%26p\\_p\\_col\\_count%3D2%26\\_101\\_INSTANCE\\_ME2g\\_keywords%3D%26\\_101\\_INSTANCE\\_ME2g\\_advancedSearch%3Dfalse%26\\_101\\_INSTANCE\\_ME2g\\_andOperator%3Dtrue%26\\_101\\_INSTANCE\\_ME2g\\_delta%3D75%26](http://www.kln.gov.my/web/nam_windhoek/s2017/-/asset_publisher/ME2g/blog/statement-by-the-minister-of-foreign-affairs-at-the-oic-contact-group-on-the-rohingya-muslim-minority-in-myanmar-new-york-19-september-2017?redirect=%2Fweb%2Fnam_windhoek%2Fs2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ME2g%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_2hlE_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_ME2g_keywords%3D%26_101_INSTANCE_ME2g_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_ME2g_andOperator%3Dtrue%26_101_INSTANCE_ME2g_delta%3D75%26), 19 September 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 14 Agustus 2018



ditinggalkan oleh negara-negara lain. Mereka yang mengadopsi peran *Defender of The Faith* melakukan tanggung jawab untuk menjamin kemurnian ideologi dalam suatu kelompok negara. Kemudian, dari peran yang sudah dipilih oleh Malaysia tersebut, mempengaruhi kebijakan luar negerinya terkait krisis yang dialami oleh etnis Rohingya yaitu dengan melakukan desakan kepada Pemerintah Myanmar. Dapat digambarkan dalam model berikut ini:

Gambar 1.2 Implementasi Politik Luar Negeri Malaysia kedalam Modifikasi Teori Peran oleh K. J. Holsti



Namun dalam kenyataannya, apa yang dilakukan Malaysia terhadap Myanmar adalah turut mencampuri urusan dalam negeri Myanmar yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN yaitu tidak boleh melakukan intervensi terhadap kondisi dalam negeri masing-masing negara ASEAN. Sikap politik luar negeri Malaysia tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Politik Luar Negeri yang ditulis oleh K. J. Holsti.

#### **D. HIPOTESA**

Malaysia tetap melakukan desakan kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik Rohingya karena mengambil peran *Defender of The Faith* yang bersumber dari prinsip-prinsip fundamental ASEAN antara lain:

1. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan kawasan.
2. Penolakan agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lain dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan hukum internasional.
3. Menghormati kebebasan fundamental, mendorong dan melindungi hak-hak asasi manusia, dan mendorong keadilan sosial.
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara damai.

#### **E. JANGKAUAN PENELITIAN**

Batasan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan rumusan masalah yang telah diajukan. Pembatasan ruang lingkup diperlukan untuk objek penelitian menjadi spesifik dan jelas, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi kajian pada desakan yang dilakukan oleh Malaysia kepada Pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2016 – 2017

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, proses-proses sosial.

Untuk membantu mendeskripsikan penelitian ini diperlukan strategi atau metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan penelitian berbasis data sekunder seperti buku teks, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, dan bahan-bahan lain. Penggunaan dokumen sekunder adalah dokumen yang mengacu kepada dokumen primer atau menganalisis dokumen primer. Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan penelitian berbasis internet. Pemanfaatan internet selain untuk mengakses materi ilmiah tradisional seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku, serta dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diajukan.

## **G. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui alasan Mengapa Malaysia melakukan intervensi kepada Pemerintah Myanmar terkait konflik Rohingya.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I** Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Dalam bab ini akan dijelaskan tentang politik luar negeri Malaysia dengan menjadi anggota ASEAN dan prinsip-prinsip ASEAN

BAB III	Dalam bab ini akan dijelaskan tentang konflik etnis Rohingya dan desakan Malaysia kepada Pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik yang dialami etnis Rohingya
BAB IV	Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis mengapa Malaysia tetap mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya
BAB V	Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan